

DAFTAR ISI

A. Buku-Buku

- Abdurahman. (2004). *Kedudukan Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan Agraria Indonesia*. (Jakarta: Akademik Presindo).
- Abdurrahman. (1991). *Masalah Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti).
- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Fikahati Aneska).
- Aditjondro, G. J. (1993). *Dimensi-dimensi Politis Sengketa Tanah*. (Medan: Makalah Latihan Analisis Sosial Tanah).
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Arie S. Hutagalung. (2002). *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI).
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Azam, S. (2003). *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*. (Medan: Digitized by USU Digital Library, Makalah Fakultas Hukum USU).
- Denim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Dewa, E. S. (2015). *Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria*. (Jakarta: Moot Court Community FSH UIN).
- Effendie, B. (1993). *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. (Bandung: Alumni).
- Emirzon, J. (2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Harsono, B. (1994). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. (Jakarta: Djambatan).
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Penerbit Djambatan).

- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Juliantra, D. (1995). *Sengketa Tanah, Modal, dan Transportasi*. (Yogyakarta: Forum LSM LPSM).
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset).
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Murad, R. (2003). *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah*. Jakarta.
- Murad, R. (2013). *Administrasi Pertanahan*. (Bandung: CV Mandar Maju).
- Nurlinda, I. (2009). *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).
- Rajab, A. (2016). *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan*. (Jakarta: Badan Keahlian DPR RI).
- Roeroe, S. D. (2013). *Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan*. (Jakarta: Varia Peradilan).
- Sembiring, S. (2006). *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Setiawan, U. (2010). *Kembali ke Agraria*. (Yogyakarta: Penerbit STPN, KPA, Sayogyo Institute).
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Remadja Karya).
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada).

- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soerodibroto, S. (1999). *KUHP dan KUHPA*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Suardi. (2005). *Hukum Agraria*. (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM).
- Sumardjono, M. S. (26 Maret 1996). Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Secara Hukum. *Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan*. (Jakarta: Sigma Conference).
- Syarief, E. (2017). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wijaya, G. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir (Edisi Baru)*. (Yogyakarta: Penerbit Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sayogyo Institute dan Akatiga).

B. Jurnal, Wawancara dan Makalah

- Agraria, K. P. (2017). Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi. *Catatan Akhir Tahun*, halaman 7.
- Harsono, B. (1996). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sesuai Ketentuan-Ketentuan Dalam UUPA. *Seminar HUT UUPA XXXVI*. Jakarta : Kantor Kementerian Negara Agraria/Kepala BPN RI.
- Hunggul, P. (2019, Oktober 16). Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang. (T. Pakarti, Interviewer)
- Kirk, M. L. (1998). Land Tenure in Development Cooperation: Guiding Principles, Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. *Wiesbaden*, page 82.
- Kismartini, d. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Murad, R. (2003). Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah. *Seminar Nasional “Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya”*, halaman 6.

- Murad, R. (2003, Agustus 20). Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah. *Seminar Nasional “Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya”*, p. halaman 6.
- Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta : Gramedia.
- Rajagukguk, E. (2000). Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan. *Jurnal Magister Hukum*, Vol.2 No.4 .
- Sumardjono, M. S. (1996). Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Secara Hukum. *Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan*. Jakarta: Sigma Conferences .
- Sumardjono, M. S. (2011). Reorientasi Kebijakan Pertanahan. *Konflik Pertanahan*, halaman 65.
- Supratman. (2015). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung . *Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 6.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria;
- Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.